

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari 115 jumlah BUMN, 70 BUMN dikategorikan transparan, 5 BUMN dengan kategori cukup transparan, 34 BUMN kategori tidak transparan dan 6 BUMN sangat tidak transparan.
 - a) Perseroan (Tbk) BUMN sebanyak 17 BUMN, 16 diantaranya dikategorikan transparan dan 1 sangat tidak transparan.
 - b) Perseroan (tertutup) BUMN sebanyak 84 perusahaan, 5 Perseroan (tertutup) kategori cukup transparan, 5 Perseroan (tertutup) kategori sangat tidak transparan, 27 Perseroan (tertutup) tidak transparan dan 47 Perseroan (tertutup) transparan.
 - c) Perusahaan Umum sebanyak 14 perusahaan, 7 perusahaan dikategorikan transparan, 7 perusahaan dikategorikan tidak transparan.

BUMN disektor jasa keuangan dan asuransi merupakan sektor usaha paling banyak BUMN transparan dengan 17 perusahaan transparan.

2. Indeks BUMN tahun 2017 sebanyak 43,6% BUMN mendapatkan indeks transparan sedangkan indeks transparansi 2018 sebanyak 61% BUMN indeks transparan, Penelitian indeks transparansi 2017 menyampaikan bahwa masih rendahnya tingkat penyampaian laporan tahunan pada website, hal demikian masih ditemukan pada penelitian indeks transparansi tahun 2018.

B. Saran

1. Pemerintah sudah seharusnya memberikan aturan terhadap BUMN menggunakan teknologi informasi (website) untuk menyampaikan informasi publik masing-masing BUMN. Karna UU KIP telah memberikan aturan untuk keterbukaan informasi publik maka peraturan pelaksanaan untuk penyampaian informasi publik melalui website bisa dilakukan dengan peraturan metri. Melalui penggunaan website BUMN dapat menyebarkan secara luas informasi publik secara efisien. BUMN seharusnya harus memiliki inisiatif untuk memberikan informasi melalui website dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkungan BUMN, agar website masing-masing BUMN lebih responsif terhadap penyampaian informasi publik dan mudah diakses masyarakat.
2. Peningkatan sumber daya manusia oleh BUMN mestinya terus dikembangkan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi sehingga kedepannya website BUMN yang informatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara efisien untuk memantau keterbukaan informasi publik oleh BUMN.